

(Review) Rencana Strategis 2015 - 2019



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian



2016

PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan tersusunnya Review Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2015 - 2019 sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019.

Dengan diselesaikannya Review Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2015 - 2019, maka diharapkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur lahan dan air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida, serta dukungan alat dan mesin pertanian, selama lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi dan menjadi komitmen bersama antara Pusat dan Daerah serta terpadu antar subsektor maupun sektor.


Dengan berkembangnya infrastruktur lahan dan air, ketersediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida, dukungan alat dan mesin pertanian di lapangan, diharapkan mampu memberikan dukungan yang kuat bagi berkembangnya kegiatan usaha tani, peningkatan produksi dan nilai tambah, sehingga terwujudnya masyarakat petani yang sejahtera sebagai salah satu target utama Kementerian Pertanian 2015 - 2019.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerja-sama dan menyumbangkan pemikirannya dalam menyusun buku ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2016

Direktur Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian,


Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	7
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	22
2.1. Visi	22
2.2. Misi	22
2.3. Tujuan	23
2.4. Sasaran	25
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	26
3.1. Strategi	26
3.2. Arah Kebijakan	30
3.3. Program Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	36
BAB IV. PENUTUP.....	39
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Target Pembangunan Dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015 - 2019 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Lampiran 2. Indikator Kinerja Tujuan Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti antara lain meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat (*jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga*), serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian, maka pembangunan pertanian khususnya target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian kedepan masih diperlukan adanya dukungan prasarana dan sarana pertanian, melalui pengelolaan lahan dan air, peningkatan akses permodalan bagi petani, penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat serta peningkatan pemanfaatan dan fasilitasi penyediaan alat mesin pertanian (alsintan).

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian difokuskan untuk mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Tantangan pembangunan pertanian ke depan dari aspek prasarana dan sarana pertanian antara lain bagaimana

memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Evaluasi pencapaian program dan kegiatan didasarkan pada sasaran dan atau standart kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya (tahun 2011 - 2014), sebagai berikut :

Tabel-1. Realisasi Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2011 s/d 2014

No	Kegiatan	Satuan	Target Renstra 2011 s.d 2014	Realisasi DIPA 2011 s.d 2014	%	Target Yang Belum Tercapai
A. <u>Perluasan dan Pengelolaan Lahan</u>						
1	Perluasan Areal TP, Horti, Bun, dan Nak	Ha	352.637	291.683	82,71	60.955
2	Optimalisasi Lahan	Ha	664.772	641.601	96,51	23.171
3	Jalan Pertanian	Km	2.331	2.302	98,73	30
4	Pengembangan Metode SRI	Ha	445.838	434.759	97,52	11.079
5	Pra dan Pasca Sertifikasi Lahan	Bidang	281.400	177.743	63,16	103.657
B. <u>Pengelolaan Air Irigasi</u>						

No	Kegiatan	Satuan	Target Renstra 2011 s.d 2014	Realisasi DIPA 2011 s.d 2014	%	Target Yang Belum Tercapai
6	Pengembangan Sumber Air	Unit	2.860	4.775	166,96	0
7	Pengembangan Jaringan Irigasi	Ha	1.743.657	1.887.955	108,28	0
8	Pembangunan Embung / Dam Parit	Paket	16.059	14.708	91,59	1.351
9	Pengembangan Kelembagaan P3A	Paket	2.224	2.178	97,93	46
C. <u>Pupuk dan Pestisida</u>						
10	Pupuk Bersubsidi	Juta Ton	39,05	35,04	89,73	4
11	Bantuan Langsung Pupuk	Juta Ton	0,42	0,22	52,38	0,2
12	Rumah Kompos	Unit	371	371	100	0
13	Unit Pengolah Pupuk Organik	Unit	2.424	2.423	99,96	1
D. <u>Alat dan Mesin Pertanian</u>						
14	Alat dan Mesin	Unit	22.255	24.131	108,43	0
15	Pengembangan UPJA	Paket	10.060	7.143	71,00	2.917
16	Pengawasan Alsintan	Paket	24	24	100	0
E. <u>Pembiayaan Pertanian</u>						
17	PUAP	Gapoktan	19.213	20.173	105,00	0
18	Kredit Program Perbankan *)	Triliun	22	40	180,9	0
19	Pembiayaan Syariah	Triliun	7,5	13	178,67	0
20	Kegiatan LKMA	LKMA	425	425	100	0

*) Dana perbankan

- a. Dari Tabel-1 tersebut diatas, masih terdapat sisa kegiatan pada TA 2011 s.d 2014 yang belum tercapai, target kegiatan yang belum tercapai tersebut, diharapkan dalam TA. 2015 - 2019 akan dapat dilanjutkan, oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- b. Hasil aspirasi masyarakat tani terhadap fasilitasi penyediaan infrastruktur lahan dan air, maupun perluasan areal adalah : (i) terjadinya peningkatan produksi dengan meningkatnya indeks pertanaman (IP) dan produktivitas, (ii) terjadinya penyerapan tenaga kerja di pedesaan, (iii) peningkatan efisiensi biaya produksi, (iv) petani sangat mendukung kegiatan pengelolaan lahan dan air maupun perluasan areal, dengan model Bantuan Pemerintah, sehingga tingkat partisipasi petani meningkat.
- c. Pada aspek pembiayaan petani masih terkendala mendapatkan fasilitasi pembiayaan hal ini disebabkan antara lain: (a) Skala usaha petani yang umumnya tidak bankable sehingga petani kesulitan dalam menyediakan agunan bagi perbankan; (b) belum optimalnya pengembangan lembaga penjaminan usaha di bidang pertanian / Asuransi Pertanian; (c) belum berkembangnya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian/Bank Pertanian.

Dari laporan Bank Indonesia terdapat kecenderungan perbankan komersial menyalurkan kredit kepada sektor industri, jasa dan perdagangan dll. Dari total Rp. 3.186,5 Triliun penyaluran kredit pada tahun 2013, yang disalurkan

kepada sektor pertanian hanya sebesar $\pm 5\%$ atau setara dengan Rp. 161,9 Triliun. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan Bank dan BPR Syariah kepada sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 7,3 Trilyun atau $\pm 3,21\%$ dari total portofolio pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan keberpihakan perbankan kepada usaha pertanian yang relatif masih kecil.

- d. Hasil evaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2011 - 2014 yang mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan budidaya, menunjukkan peningkatan penyerapan hampir semua jenis pupuk kecuali organik bersubsidi, pupuk lainnya meningkat pada tahun 2014. Perkembangan rencana dan realisasi penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2011 - 2014 sebagai berikut :

Tabel.2. Rencana dan Realisasi Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2011 - 2014.

No.	Jenis Pupuk	2011	2012	2013	2014	
1.	Urea	Target (ribu ton)	4.954,24	5.100,00	4.100,00	4.100,00
		Realisasi (ribu ton)	4.528,95	4.152,17	2.511,57	3.997,39
		Persentase (%)	91,42	81,42	61,26	97,50
2.	SP-36/ Superphos	Target (ribu ton)	750	1.000,00	850	850,00
		Realisasi (ribu ton)	731,5	855,53	553,18	796,00
		Persentase (%)	97,53	85,55	65,08	93,65
3.	ZA	Target (ribu ton)	975	1.000,00	1.000,00	1.050,00
		Realisasi (ribu ton)	953,76	996,78	689,83	972,41
		Persentase (%)	97,82	99,68	68,98	92,61

No.	Jenis Pupuk		2011	2012	2013	2014
4.	NPK	Target (ribu ton)	2.350,00	2.593,92	2.400,00	2.550,00
		Realisasi (ribu ton)	1.794,77	2.167,66	1.514,44	2.374,58
		Persentase (%)	76,37	83,57	63,1	93,12
5.	Organik	Target (ribu ton)	703,99	835	900	1.000,00
		Realisasi (ribu ton)	388,16	741,15	524,04	742,54
		Persentase (%)	55,14	88,76	58,23	74,25

disamping itu pada tahun 2011 sampai 2012, pemerintah menetapkan kebijakan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) untuk mendukung peningkatan produksi padi melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). Rencana dan Realisasi penyaluran BLP Tahun 2011 - 2014 sebagai berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Penyaluran BLP Tahun 2011 - 2014

JENIS PUPUK		2011	2012	2013	2014
Organik Granul (ton)	Target (Ton)	105.004,20	5.952.200	-	-
	Realisasi	104.969,10	5.952.200	-	-
	% Realisasi	99,97	100	-	-
Organik Cair (liter)	Target (Ton)	2.864,68	-	-	-
	Realisasi	2.864,68	-	-	-
	% Realisasi	100	-	-	-
NPK (ton)	Target (Ton)	105.004,20	5.952.200	-	-
	Realisasi	104.969,10	5.952.200	-	-
	% Realisasi	99,97	100	-	-

f. Penerapan alsintan masih ditandai oleh beberapa kendala yaitu ketersediaan alsin produksi maupun pasca panen yang belum mencukupi, penempatan dan pemanfaatan alsin yang belum optimal, kemampuan petani yang masih terbatas dalam penggunaan alsin serta kemampuan ekonomi petani pengguna alsintan yang masih rendah, sedangkan harga alsin pada umumnya belum terjangkau oleh petani pengguna terutama untuk produk impor. Dalam hal ini, peranan pemerintah, akademisi maupun swasta terkait baik di pusat maupun daerah diperlukan agar teknologi mekanisasi tersebut dapat berkembang seiring tercapainya kesejahteraan petani.

1.2. Potensi dan Permasalahan.

a. Potensi.

1) Sumberdaya Lahan

Dari sisi sumberdaya lahan, terbuka peluang untuk pembukaan lahan pertanian melalui (1) pemanfaatan lahan terlantar, yang dewasa ini diperkirakan mencapai luas 4,8 juta ha, serta meningkatkan luas tanam pada lahan-lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya dan (2) pembukaan lahan baru untuk pertanian. Dari luas daratan Indonesia sekitar 192 juta hektar, terdapat lahan potensial sekitar 94,1 juta hektar yang sesuai untuk usaha pertanian tanpa mengganggu ekologis daerah aliran sungai. Dengan total luas lahan pertanian yang ada saat ini sekitar 63,7 dan 8,1 juta ha adalah

lahan persawahan, maka diperkirakan masih terbuka peluang untuk perluasan areal pertanian sekitar 30,4 juta hektar. Disamping itu Lahan pertanian terlantar yang saat ini jumlahnya cukup luas yaitu sekitar 4,8 juta hektar (Pusdatin, 2013) merupakan potensi yang patut diperhitungkan dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan pertanian yang semakin meningkat.



Adanya potensi lahan yang cukup luas dan air yang cukup tersedia untuk pengembangan usaha pertanian pada berbagai tipologi lahan. Dilain pihak tidak semua potensi lahan dapat langsung dimanfaatkan karena berbagai kendala, seperti lahan yang secara alami bermasalah / marginal dan kurang memberikan daya dukung.

Kemandirian pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan merupakan aspek paling strategis bagi negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar. Disatu sisi kebutuhan berbagai jenis bahan pangan perlu ditingkatkan, namun disisi

lain ketersediaan prasarana dan sarana pertanian terbatas. Untuk itu maka pencapaian ketahanan pangan perlu memfokuskan pada komoditas utama yang sangat diperlukan dengan merubah kebijakan dari pengembangan multi komoditas ke komoditas terpilih, dengan di dukung pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang efektif dan efisien.

2) Sumberdaya Air.

Adanya sumberdaya air seperti air tanah, air permukaan dan air hujan yang banyak tetapi belum didayagunakan secara maksimal. Misalnya curah hujan, 60% wilayah Indonesia memiliki rata-rata curah hujan per tahun 2000 - 3500 mm, 20% memiliki curah hujan 3500 - 5000 mm per tahun, 16% memiliki curah hujan 1000 - 2000 mm pertahun. Sedangkan wilayah dengan curah hujan diatas 5000 mm dan dibawah 1000 mm masing-masing hanya 3% dan 1%. Kondisi ini apabila dapat dikendalikan dan dimanfaatkan dengan benar akan merupakan dukungan ketersediaan air irigasi yang luar biasa.

Ketersediaan teknologi pengelolaan air untuk produksi pertanian memungkinkan nilai tambah dan nilai tukar pertanian dapat ditingkatkan.

Potensi sumber daya manusia pertanian yang langsung terkait sebagai pelaku (petani) dari segi latar belakang dan jumlah cukup banyak, namun dari segi pendidikan dan pengetahuan masih perlu terus diupayakan peningkatannya.



- 3) Potensi sumber pembiayaan pertanian secara umum berasal dari :
- a. Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan;
 - b. Pembiayaan yang bersumber dari dana BUMN PKBL/CSR ;
 - c. Pembiayaan yang bersumber dari investasi BUMN dan swasta;
 - d. Pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat;
 - e. Pembiayaan yang bersumber dari dana APBN dan APBD;

- f. Pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada gapoktan PUAP dan lembaga adat masyarakat; serta
- g. Sumber pembiayaan lainnya.

Pemerintah melalui fasilitasi subsidi, diharapkan dapat meningkatkan peyaluran kredit dari skim: 1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) untuk peningkatan produksi pangan; 2) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) untuk pengembangan tanaman perkebunan;. Disamping itu terdapat skim khusus untuk pembibitan sapi yaitu KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pola penjaminan, dimana risiko kredit (80%) dijamin kepada perusahaan penjamin yang imbal jasa penjaminan (IJP) dibayar oleh pemerintah.

Fasilitasi pembiayaan dari dana pemerintah melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) diharapkan dapat menumbuhkan kelembagaan petani yang focus melayani pembiayaan usaha tani skala mikro dan kecil. Pada saat ini terdapat potensi 52.186 Gapoktan untuk tumbuh sebagai kelembagaan keuangan mikro di 451 Kabupaten/Kota pada 34 Provinsi untuk dapat difasilitasi menjadi jaringan (network) perbankan dalam mengoptimalkan pembiayaan bagi petani mikro - kecil di pedesaan

dalam bentuk pengelolaan keuangan secara konvensional dan syariah.



4) Potensi Penyediaan Pupuk dan Pestisida

Produsen pupuk terbesar di dalam negeri adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu: PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Kujang Cikampek, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik. Total kapasitas produksi terpasang sebesar 14.596 juta ton per tahun, yang mencakup pupuk Urea, SP-36/Superphos, ZA, NPK dan pupuk organik. Namun, produksi pupuk sangat tergantung pada pasokan bahan baku utama (gas bumi/alam) dan bahan baku pupuk lainnya (Fosfat dan Kalium) yang sebagian besar diimpor. Perkembangan produksi pupuk oleh BUMN tahun 2011 - 2014 sebagai berikut:

Tabel 4. Kapasitas Terpasang dan Produksi Pupuk Tahun 2011 - 2014

Jenis Pupuk	Kapasitas Terpasang	Produksi (ribu ton)			
	(ribu ton/tahun)	2011	2012	2013	2014
• Urea	13.045,31	6.743,95	6.301,36	6.698	6.742
• SP-36/ superphos	926,17	441,22	484,95	518	400
• ZA	1.562,17	817,76	744,41	827	816
• NPK	4.793,63	2.146,88	2.646,75	2.528	2.715
• Organik				783	711
Jumlah	20.327	10.150	10.177	11.354	11.384

Catatan: *) termasuk pengadaan dari impor

Disamping itu, terdapat pupuk terdaftar diproduksi oleh perusahaan industri kecil menengah (IKM) Tahun 2011-2014, mencapai sekitar 1.549 formula, sebagai berikut:

Tabel 5.: Perkembangan Jenis dan Jumlah Pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian oleh Perusahaan IKM Tahun 2011-2014

No	Jenis Pupuk	Tahun Penerbitan (Formula)				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
1	An-organik	287	182	237	250	956
2	Organik	261	129	105	98	593
	Jumlah	548	311	342	348	1549

Tabel 6: Perkembangan Jumlah Pestisida Yang Terdaftar di Indonesia Tahun 2011 - 2014

No	Jenis Pestisida	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Akarisida	17	18	18	16
2	Atraktan	7	15	20	25
3	Bahan Pengawet Kayu	66	77	75	72
4	Bakterisida	7	7	8	7
5	Fumigan	21	32	32	31
6	Fungisida	405	449	532	555
7	Herbisida	672	742	870	895
8	Insektisida	887	988	1109	1138
9	Lain-lain	12	12	11	11
10	Moluskisida	51	56	64	65
11	Nematisida	4	4	3	3
12	Pestisida Rumah Tangga	164	360	331	292
13	Repelan	211	37	37	34
14	Rodentisida	38	66	71	74
15	ZPT	110	124	154	150
	Jumlah	2672	2987	3335	3368

5) Potensi Alat dan Mesin Pertanian

Upaya untuk mencapai visi pertanian 2015 - 2019 yaitu terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, berarti kemampuan lahan pertanian sebagai sumber utama produksi harus benar-benar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga mencapai produktivitas yang tinggi. Dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada harus efisien sehingga dapat menghasilkan out put yang tinggi, berkualitas, ramah lingkungan serta mempunyai nilai tambah dan daya saing tinggi. Kondisi diatas adalah sama dengan mendorong terwujudnya suatu pertanian modern

melalui pengembangan dari usaha tani yang sudah berkembang lama dan membudaya lama dalam pertanian tradisional. Dalam hal ini, potensi-potensi unggulan dari sumberdaya lokal tetap menjadi faktor utama yang digunakan sebagai dasar pengembangan dengan tetap melakukan inovasi teknologi secara terencana, konsisten dan terus menerus.

Alsintan jelas merupakan salah satu potensi yang siap untuk dikembangkan dalam upaya mencapai visi pembangunan pertanian industrial yang tangguh. Potensi tersebut akan menjadi output yang signifikan apabila dikelola melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan serta didukung oleh kesadaran masyarakat pengguna, baik dalam hal pemanfaatannya untuk selalu menggunakan sesuai sesuai standar mutu dan aturan yang ada maupun kemauan untuk meningkatkan kemampuannya untuk menggunakan alsintan sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses produksi sampai penanganan pasca panennya.



Berdasarkan Undang Undang No. 32 tahun 2005 tentang Otonomi Daerah telah meningkatkan peran propinsi dalam koordinasi, sehingga memungkinkan program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dapat disinergikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pembiayaannya

Meningkatnya kemampuan pendanaan propinsi dan kabupaten / kota melalui penggalan PAD, memungkinkan alokasi pendanaan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan.

b. Permasalahan

1) Sumberdaya Lahan

Permasalahan sumber daya lahan yang dihadapi saat ini antara lain, adalah : penguasaan lahan pertanian per kapita semakin sempit dan jumlah petani gurem setiap tahun semakin meningkat (jumlah petani gurem 13,7 juta

KK dan laju peningkatan 2,4 % per tahun); terjadinya laju peningkatan konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian (\pm 110.000 ha/tahun); infrastruktur pertanian yang sangat minim berdampak pada penurunan produktivitas hasil pertanian serta meningkatnya luas lahan yang sementara tidak diusahakan (luas lahan terlantar \pm 4,8 ha); luasan lahan kritis di Indonesia cenderung makin meningkat; terjadinya laju peningkatan degradasi lahan pertanian dengan laju 2,8 juta ha/tahun (khususnya lahan sawah); masih luasnya lahan marginal yang sifat fisika, kimia dan biologi tidak mendukung untuk pertumbuhan serta hasil pertanian yang optimal tanpa masukan teknologi yang memadai. Disamping permasalahan tersebut, secara yuridis-normatif peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian lahan masih jauh dari memadai (*lack of law*), di samping adanya fakta empiris dimana dalam hal pelaksanaannya pun, penegakkan hukum terhadap peraturan yang ada yang terkait dengan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan lahan pertanian masih sangat lemah (*weak of law enforcement*).

2) Sumberdaya Air

Dengan makin luas dan tingginya tingkat degradasi lingkungan, khususnya pada Daerah Aliran Sungai telah menyebabkan ketidak-seimbangan antara pasokan air dengan kebutuhan, baik dalam kuantitas, kualitas, dan waktu. Disamping itu makin tingginya kompetisi penggunaan

air antar sektor, menyebabkan air terbagi untuk memenuhi banyak sektor.

Dari aspek lingkungan, issue perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global (global warming) telah menjadi perhatian sebagian besar penduduk dunia. Sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim adalah sektor pertanian. Dampak yang paling nyata dari perubahan iklim adalah peningkatan suhu udara, perubahan pola hujan dan peningkatan terjadinya iklim ekstrim atau anomali. Kejadian banjir dan kekeringan dengan frekwensi dan durasi yang semakin meningkat telah menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar bagi sektor pertanian.

Permasalahan sumberdaya air lainnya antara lain belum optimalnya koordinasi kelembagaan pengelolaan air; sebagian besar infrastruktur irigasi rusak ringan sampai dengan berat sekitar 53 % sehingga mengalami penurunan fungsi; beberapa pulau di Indonesia (Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Kalimantan) yang merupakan sentra produsen pertanian telah mengalami defisit air.



- 3) Dari hasil evaluasi perkembangan penyaluran kredit/ pembiayaan dari perbankan yang hanya berkisar 5,2 -5,6% per-tahun kepada sektor pertanian, terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara kebutuhan dana pembangunan pertanian dengan ketersediaan dana pihak perbankan.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain: (a) Belum adanya bank /lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian; (b) Sebagian besar usaha yang dilakukan petani berada dalam kelompok usaha tidak *bankable*; (c) Masih tingginya suku bunga kredit serta Skim kredit bank /lembaga keuangan umumnya masih fokus membiayai usaha di aspek produksi dan belum fokus pada aspek pasca produksi; (d) Belum optimalnya pelaksanaan asuransi kerugian komoditi untuk melindungi petani dari kerugian baik dari segmen *on-farm* maupun kerugian pada *off-farm*; (e) Belum optimalnya pemanfaatan dana laba PKBL, BUMN, dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) maupun sumber pendanaan lainnya dari lembaga keuangan non-bank kepada petani; dan (f) Belum berkembangnya fasilitator pembiayaan yang membantu petani untuk mengakses kredit/pembiayaan kepada perbankan.

- 4) Meningkatnya kebutuhan pupuk untuk sektor pertanian sejalan dengan bertambahnya permintaan komoditas pertanian untuk pangan, industri dan *energy- bio fuel*. Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan pupuk antara lain adalah: (a) aspek produksi pupuk terkendala dengan

jaminan pasokan bahan baku seperti gas, dan bahan baku pupuk seperti Phosfat dan Kalium yang sebagian besar impor; serta umur pabrik yang sudah melewati masa ekonomis; (b) aspek distribusi, antara lain terjadinya peredaran/perdagangan pupuk secara illegal; (c) aspek penggunaan, adalah penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi belum merata, terutama penggunaan pupuk organik masih sangat rendah sehingga kondisi lahan pertanian semakin menurun produktivitasnya; dan (d) aspek pengawasan, belum optimalnya kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan fasilitasi anggaran dalam APBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna pengawalan peredaran dan pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat lapangan.

- 5) Masalah dan kendala pengembangan alat dan mesin pertanian (mekanisasi pertanian) di Indonesia, antara lain : karakteristik lahan, luas kepemilikan dan sebaran lahan; beragamnya kondisi sosial ekonomi petani terutama modal, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan budaya; sistem usahatani yang masih subsistem dan tradisional serta prasarana/infrastruktur penunjang khususnya jalan usahatani yang masih minim.

Selain itu kondisi kelembagaan alsintan yaitu Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan perbengkelan masih

belum berkembang dengan optimal, dikarenakan lemahnya pengelolaan baik dari aspek teknis, ekonomis dan organisasi.

Dalam peredaran dan distribusi alsintan, pengawasan terhadap alat dan mesin pertanian baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor masih lemah sehingga mutu alat dan mesin pertanian tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. Lemahnya pengawasan alat dan mesin pertanian disebabkan kurangnya dukungan SDM dan sarana operasional pengawasan alat dan mesin pertanian.



BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Dalam merumuskan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai landasannya adalah Visi dan Misi Kementerian Pertanian, sebagai berikut :

Visi Kementerian Pertanian adalah : Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Misi Kementerian Pertanian adalah : (1) Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi (2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian (3) Mewujudkan kesejahteraan petani (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian Yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas Tinggi.

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”**

2.2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perluasan dan perlindungan lahan pertanian.

- b. Mengembangkan pengelolaan air dan irigasi pertanian
- c. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi melalui PSO sesuai azas 6 (enam) tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga serta meningkatkan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida beredar
- d. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan sektor pertanian serta mendorong perlindungan usaha tani melalui pengembangan asuransi pertanian
- e. Menyelenggarakan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia

2.3. Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah **“Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan dan perlindungan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian”**

2.3.1. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 - 2019 dicapai dengan:

- 1) Tersedianya lahan pertanian dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan

- 2) Terwujudnya Pengelolaan air irigasi pertanian dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
- 3) Tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga) serta lebih teraturnya peredaran pupuk pestisida di lapangan sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Terfasilitasinya pembiayaan dan perlindungan sektor usaha tani.
- 5) Terwujudnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia sesuai dengan arah pembangunan pertanian.

2.3.2. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah :

Untuk mengukur sejauh mana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mencapai tujuan strategis tersebut diatas maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015-2019
1	Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian	Jumlah penambahan Luas Areal Pertanaman	Penambahan Luas Areal Pertanaman seluas 1.850.000 Ha

2.3.3. Indikator Kinerja Tujuan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :

Untuk mengukur kinerja tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang berada dalam unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagaimana pada lampiran 2.

2.4. Sasaran

Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Penambahan Luas Pertanaman seluas 1.850.000 Ha Terwujudnya penambahan luas pertanaman seluas 1.850.000 Ha dicapai melalui kegiatan :

1. Penambahan luas baku lahan melalui Pencetakan sawah baru
2. Peningkatan ketersediaan air untuk sektor pertanian
3. Peningkatan fasilitasi penyaluran pupuk dan pengawasan pestisida
4. Peningkatan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap resiko
5. Peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Good Governance

Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Secara Lestari

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan data luasan lahan pertanian, tata aturan pengelolaan lahan dan air, pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, reklamasi, jalan usaha tani dan jalan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) serta

meningkatkan kesuburan dan produktivitas lahan melalui pengelolaan air yang efisien dan efektif dengan mengembangkan dan merehabilitasi jaringan irigasi ditingkat usahatani, jaringan irigasi desa, dan Tata Air Mikro (TAM) melalui partisipasi masyarakat.

Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim terutama kenaikan suhu udara dan ketersediaan air di saat musim kemarau sehingga perlu tersedia sumber irigasi suplementer dengan teknik pemanenan air (water harvesting) seperti embung/dam parit dan sumur resapan.

3) Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan

Melaksanakan penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian yang berbasis komoditas. Perkembangan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dipandang positif, kondisi ini dapat membangun sistem pembagian manfaat ekonomi secara lebih adil dan merata antar wilayah, antar pelaku ekonomi (pengentasan kemiskinan) dan antar generasi yang dapat memberikan dampak positif (langsung maupun tidak langsung) terhadap perbaikan ekosistem lokal maupun global. Oleh karena itu penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian berbasis komoditas perlu dikaji skala ekonominya dengan baik.

4) Mendorong Pola Partisipatif

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat/petani dalam pengelolaan lahan dan air dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pengarusutamaan gender (PUG) agar mandiri dan proaktif melalui kegiatan-kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dalam suatu wadah organisasi/kelompok petani yang kuat dan mandiri. Fasilitasi pemerintah harus diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas dan memberdayakan usaha masyarakat dan memberdayakan usaha masyarakat, antara lain melalui pola Bantuan Sosial.

5) Menggalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi

Melaksanakan penggalangan sinergi semua instansi terkait dalam memberdayakan potensi sumber daya pertanian yang ada untuk pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

6) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang *Feasible* dan tidak *Bankable*, adalah mengoptimalkan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian bunga bank disubsidi oleh pemerintah serta mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan ritel.

- 7) Strategi Perlindungan petani dan usaha tani adalah mengembangkan skema pembiayaan dalam rangka perlindungan petani dan usaha taninya melalui fasilitasi program asuransi bagi kerugian petani akibat kegagalan panen
- 8) Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolah pupuk organik di tingkat petani.
- 9) Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida.
- 10) Strategi pelaksanaan penyediaan alat dan mesin pertanian, yaitu melaksanakan manajemen penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

- 11) Strategi pengembangan alat dan mesin pertanian secara selektif dan progresif, yaitu dengan melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja
- 12) Strategy pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung
- 13) Strategy penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel alsintan, yaitu pemberdayaan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi dibidang alat dan mesin pertanian.

3.2. Arah Kebijakan

Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian untuk menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran :
Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, ditempuh melalui :
 - a. Penambahan Baku Lahan (PBL)
 - b. Pendekatan kawasan yang berskala ekonomi
 - c. Kesesuaian daya dukung dan agropedoklimat
 - d. Partisipasi dan pemberdayaan petani
 - e. Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.
- 2) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran:
Perlindungan lahan, adalah :
 - a) Kebijakan perlindungan kawasan pertanian produktif yang diperlukan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di dalam penetapan kawasan dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten (RTRWP/K).
 - b) Kebijakan konservasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat pada lahan pertanian kritis, semi kritis, dan potensial kritis.
- 3) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran:
basis data lahan dalam pengembangan infrastruktur pertanian melalui program audit lahan pertanian.
 - a) Kebijakan dalam penyediaan data dan informasi luas baku lahan pertanian yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b) Kebijakan tentang jaringan data spasial Nasional berdasarkan Informasi Geospasial (IG) yang diterapkan dalam *One Map Policy*.
- 4) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upaya optimasi dan rehabilitasi lahan, dilakukan melalui mengoptimalkan pemanfaatan lahan.
- 5) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil, adalah :
- a. Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan mendayagunakan baik air permukaan maupun air tanah.
 - b. Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutan dengan cara partisipatif.
- 6) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan jaringan irigasi dan optimasi pemanfaatan air irigasi, adalah:
- a. Peningkatan fungsi prasarana irigasi,
 - b. Penerapan teknologi hemat air
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat.
 - d. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A), melalui :
 - Peningkatan kemampuan P3A dalam Pengelolaan Air Irigasi dan Produksi Pertanian;
 - Pengelolaan irigasi secara partisipatif;

- Pengembangan jejaring dan kemitraan P3A.
- 7) Kebijakan yang terkait dengan pengembangan konservasi air dan lingkungan hidup sertaantisipasi perubahan iklim, adalah :
- a) Pengembangan teknik pemanenan air dengan pembangunan embung/dam parit/longstorage.
 - b) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur resapan
 - c) Pengembangan Model Adaptasi Perubahan Iklim (PMAPI)
- 8) Kebijakan terkait dengan revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan petani dalam rangka meningkatkan ketersediaan pembiayaan/kredit bagi petani, fokus pada :
- a) Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan ;
 - b) Pembiayaan yang bersumber dari dana BUMN/ CSR
 - c) Pembiayaan yang bersumber dari dana lembaga Keuangan Non Bank;
 - d) Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan swasta dan masyarakat;
 - e) Pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat tani dan atau masyarakat yang peduli terhadap pertanian ;

- f) Pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota) ;
 - g) Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di masyarakat; serta sumber pembiayaan lainnya.
 - h) Pengembangan asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk menanggulangi resiko gagal panen.
 - i) Pengembangan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk menanggulangi resiko kematian dan kehilangan ternak sapi
- 9) Kebijakan terkait pupuk dan pestisida, adalah:
- a) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian guna mendorong penerapan pemupukan secara berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil komoditas pertanian.
 - b) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
 - c) Fasilitasi pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian.
- 10) Kebijakan pengembangan alsintan, didalamnya memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a) Kebijakan yang terkait dengan sasaran meningkatnya kepemilikan alsintan pada 33 propinsi sebesar 3 - 5 %, adalah : (a) sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan, (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota guna pemantapan kegiatan kepemilikan alsintan, (c) kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan.
- b) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya penumbuhan dan pengembangan UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional, meningkat masing-masing 10%, 10% dan 15% per tahun, adalah : (a) sosialisasi Permentan No.25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan UPJA, (b) Pembentukan Tim UPJA, (c) kebijakan pemberdayaan dalam pengelolaan UPJA , (d) peningkatan peranan UPJA dalam pengembangan alsintan, (e) kebijakan peningkatan integrasi subsistem pengguna, penyedia alsintan, permodalan dan pembinaan dalam keberlanjutan kelembagaan UPJA.
- c) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengembangan bengkel alsintan di 33 propinsi, adalah : (a) sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, (b) peningkatan peranan produsen alsintan dalam pengembangan bengkel,

- (c) peningkatan keahlian pengelola bengkel alsintan.
- d) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian yang berdayaguna dan berhasil guna di 33 provinsi meliputi : (a) sosialisasi pengawasan alsintan (b) meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas pengawas alsintan dan (c) meningkatkan sarana pengawasan alsintan.
- e) Kebijakan yang terkait dengan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 Provinsi dalam rangka peningkatan forum komunikasi dan informasi pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan.

3.3. Program Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program adalah : (d disesuaikan dgn atas)

- 1) Tersedianya kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian

- 2) Terlaksananya bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian
- 3) Tersedianya dan teroptimalisasinya pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 4) Berkembangnya sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan mudah diakses oleh petani serta sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi Pertanian.
- 5) Tersedianya dan Tersalurkannya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- 6) Berkembangnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
- 7) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional

- 8) Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- 9) Terselenggaranya manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas



BAB IV. PENUTUP

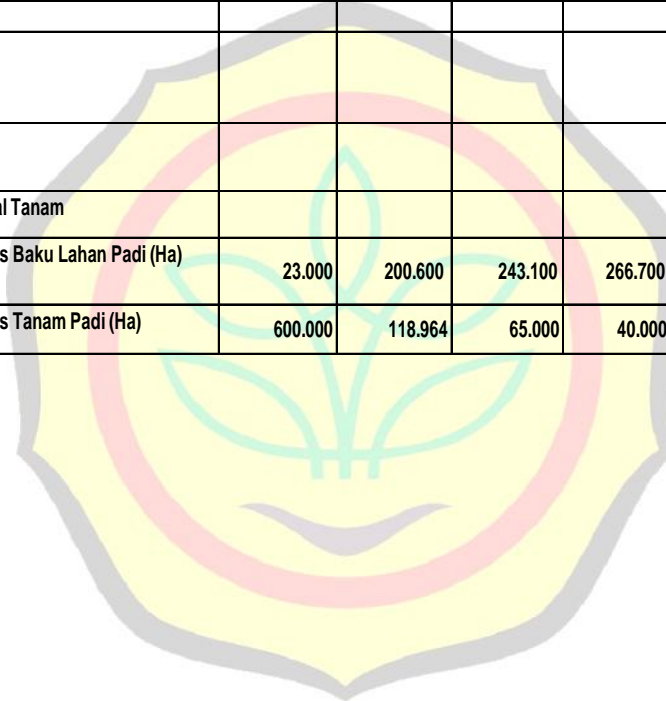
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019 merupakan kelanjutan dari program/ kegiatan tahun 2011-2014 yang telah dilaksanakan pada periode lalu. Sesuai dengan kebijakan Menteri Pertanian sebagai penanggung jawab pelaksana pembangunan pertanian, maka Visi, Misi dan Strategi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi kedepan. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta dapat menyatukan operasionalisasi dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, baik Pemerintah, institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan (*beneficiaries/ customer*) pembangunan pertanian pada umumnya dan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada khususnya.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019, disusun dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian dan RPJM Tahun 2015 - 2019, dan diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi khusus di bidang prasarana dan sarana pertanian, sesuai kondisi spesifik lokasi



TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN PERTANIAN
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN														
	Penambahan Luas Pertanaman													
		Tercapainya Perluasan Areal Tanam												
		1. Jumlah Penambahan Luas Baku Lahan Padi (Ha)	23.000	200.600	243.100	266.700	266.600	12.331,72	11.125,09	11.126,80	11.048,81	10.761,85	56.394,26	
	2. Jumlah Penambahan Luas Tanam Padi (Ha)	600.000	118.964	65.000	40.000	26.036								



TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN PERTANIAN
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian														
	Meningkatnya Infrastruktur Air Irigasi Mendukung Produksi Pertanian													
		Jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya (Ha)	2.478.182	469.532	300.000	200.000	100.000	4.698,0	751	480	320	160	6.409,3	
		Jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim (Unit)		2.500	500	500	500	0,00	250	50	50	50	400,0	
		Jumlah bangunan dan peralatan pelengkapya pemanfaatan sumber air yang dibangun (unit)	0	2.000	1.250	1.500	1.750	0,00	160	100	120	140	520,0	
		Jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi (Ha)	0	100.000	80.000	60.000	50.000		300	240	180	150	870,0	
		Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (paket)			1	1	-			2,0	2,0			

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

KEMENTERIAN PERTANIAN

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian									2.065,8	3.837,0	4.712,0	5.148,0	5.159,0	20.921,8
	Meningkatnya Luasan Areal Pertanian, Pengoptimalan Lahan, dan Mengendalikan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Serta Mendorong Peningkatan Status Kepemilikan Lahan Petani dan Mengevaluasi Pemanfaatan Sertifikat Tanah Petani													
		Jumlah Cetak sawah (Ha)	23.000	200.600	243.100	266.700	266.600	577,9	3.801	4.619	5.067	5.065	19.129,9	
		Jumlah bidang tanah petani yang di pra-sertifikasi / pasca sertifikasi (persil)		80.000	80.000	80.000	85.000	-	16	16	16	17	65,0	
		Jumlah Updating data lahan sawah (dokumen)		-	228	222	228	-	-	57	45	57	159,0	
		Jumlah Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu (Ha)		5.000	5.000	5.000	5.000	-	20	20	20	20	80,0	
		Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian (Ha)	951.301	-	-	-	-	1.144,2					1.144,2	
		Jumlah Pengembangan Metode SRI (Ha)	163.833	-	-	-	-	343,7					343,7	
		Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) (unit)	-	-	-	-	-							
		Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) (unit)	-	-	1600	-	-							

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN PERTANIAN
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian															
	Penyaluran dan Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian														
		Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian (unit)	56.937	81.000	83.025	66.420	56.457	3.304,0	3.859	3.955	3.582	3.315	18.015,0		
		Jumlah Pembentukan dan peningkatan kapasitas UPJA (kelompok)	-	-	20	30	30	-		5	7,50	7,50	20,0		

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN PERTANIAN
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida								460,0	294,7	254,4	263,6	273,4	1.546,1
	<i>Tersalurnya Pupuk Bersubsidi dan Dioptimalkannya Rumah Kompos di Daerah Sentra Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Sentra Peternakan.</i>												
		Jumlah Rumah Kompos yang dibangun untuk mendukung pengembangan pertanian organik (unit)	897	650	250	250	250	460,0	179	69	69	69	845,00
		Jumlah Layanan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi (layanan)		500	500	500	500	0	87	147	154	162	550,42
		Jumlah Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) (Paket)		500	500	500	500	0,0	29	35	37	39	140,64
		Jumlah Penguatan PPNS Pupuk dan Pestisida (Paket)		-	30	30	30		-	3	3	3	10,00
		Jumlah Pupuk Bersubsidi yang disalurkan (juta ton)	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	*) 28.256,34	*) 30.063,19	*) 31.942,32	*) 33.652,32	*) 35.422,17	
		Jumlah Bantuan Langsung Pupuk (juta ton)	0,4										

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

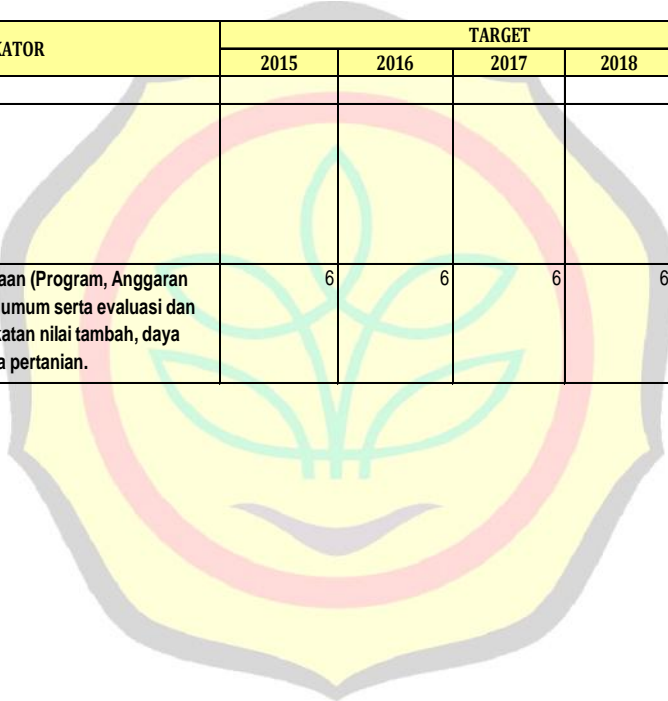
KEMENTERIAN PERTANIAN

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian													
	<i>Meningkatnya Fasilitas Pembiayaan, Pemberdayaan Kelembagaan, dan Permodalan Pertanian, Serta Peningkatan Perlindungan Terhadap Resiko Gagal Panen Melalui Asuransi Pertanian</i>												
		Jumlah Pembentukan LKMA (LKMA)	50	-	200	200	200	0,32	-	4	4	4	12,32
		Jumlah Layanan Pembiayaan Pertanian (Layanan)	0	500				0	45	41	36	36	157,50
		Dukungan Fasilitas Pembiayaan Pertanian (Bln)	0	-	12	12	12	0	-	60	60	60	180,00
		Jumlah Luas lahan sawah yang tercakup dalam asuransi pertanian (Ha)	1.000.000,0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	144	150	225	225	300	1.044,00
		Jumlah Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha (Gapoktan)	3.000	0	0	0	0	360,00	0	0	0	0	360,00
		Jumlah Asuransi Ternak Sapi (ekor)		120.000					19,2				19,20

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN PERTANIAN
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal														
		Jumlah dokumen perencanaan (Program, Anggaran dan Kerjasama), keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan nilai tambah, daya saing, sarana dan prasarana pertanian.	6	6	6	6	6	1.299,6	1.458,99	1.000,93	1.052,66	1.106,96			



INDIKATOR KINERJA TUJUAN KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERIAN PERTANIAN
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

TUJUAN GOAL	INDIKATOR TUJUAN INDICATOR OF GOAL	SATUAN UNIT	2015	2016	2017	2018	2019
1. Tersedianya lahan pertanian dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Luas Lahan Pertanian dalam mendukung pengembangan Komoditas tanaman pangan	Ha	23.000	200.600	243.100	266.700	266.600
2. Terwujudnya Pengelolaan air irigasi pertanian dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Luas lahan sawah yang Jaringan irigasinya dikelola	Ha	2.478.182	469.532	300.000	200.000	100.000
3. Tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga) serta lebih teraturnya peredaran pupuk pestisida di lapangan sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan dilapangan sesuai peraturan yang berlaku	Juta Ton	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55

INDIKATOR KINERJA TUJUAN KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERIAN PERTANIAN
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

TUJUAN GOAL	INDIKATOR TUJUAN INDICATOR OF GOAL	SATUAN UNIT	2015	2016	2017	2018	2019
4. Terasilitasinya pembiayaan dan perlindungan sektor usaha tani.	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor usaha tani padi	Ha	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5. Terwujudnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia sesuai dengan arah pembangunan pertanian.	Jumlah alat dan mesin pertanian dalam mewujudkan mekanisasi pertanian di Indonesia	Unit	56.937	81.000	83.025	66.420	56.457